

Analisis Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare

Anne Abdurachman

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Email : anne.abdrachman@gmail.com

ABSTRACT: *Bureaucratic reform is a government effort to improve the performance of state apparatus to provide optimal service to the community. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform policies on the performance of Civil Servants (PNS) at the Pare-Pare City Transportation Agency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of bureaucratic reform at the Pare-Pare City Transportation Agency has gone quite well, but there are still several obstacles such as limited human resources and supporting facilities and infrastructure. The bureaucratic reform policy has proven to have a positive effect on improving the performance of PNS in terms of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Strong commitment from leaders and all employees is needed as well as adequate budget support to optimize the implementation of bureaucratic reform in the future.*

Keywords: *bureaucratic reform, performance, civil servants, public services*

ABSTRAK : Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur negara untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Kebijakan reformasi birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PNS dalam aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Diperlukan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai serta dukungan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di masa mendatang.

Kata kunci: reformasi birokrasi, kinerja, pegawai negeri sipil, pelayanan publik

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi birokrasi merupakan sebuah langkah strategis dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelayanan publik yang buruk, hingga inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya menuntut adanya perubahan mendasar dalam sistem administrasi negara.

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia

aparatur negara mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja PNS mutlak dilakukan untuk dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare sebagai salah satu instansi pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawainya melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan telah diambil dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, seperti restrukturisasi organisasi, penataan manajemen sumber daya manusia, hingga inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat kinerja optimal PNS di lingkup Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja PNS, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan administrasi publik dan perbaikan kinerja birokrasi di masa depan.

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama penyelenggara birokrasi masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan publik terkait kinerja aparatur pemerintah, baik dari segi profesionalisme, responsivitas, maupun integritas. Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi birokrasi seperti restrukturisasi organisasi, penyederhanaan perizinan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta lemahnya komitmen dari stakeholders terkait.

Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare merupakan salah satu instansi pemerintah yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut, kinerja PNS di lingkup Dinas Perhubungan perlu ditingkatkan melalui penerapan kebijakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Namun, berbagai permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya juga masih dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kajian tentang "Analisis Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare, serta merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja PNS di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare?
2. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian reformasi birokrasi dan manajemen kinerja sektor publik.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan PNS.

3. Manfaat kebijakan, yaitu sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi percepatan reformasi birokrasi, baik di level nasional maupun daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai upaya perubahan mendasar terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Dwiyanto, 2015). Menurut Prasajo (2010), reformasi birokrasi mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2013).

Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kebijakan tersebut memuat arah, tahapan, dan prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) yang mengatur tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah (KemenPAN-RB, 2018).

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik. Menurut Edward III (1980), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan pentingnya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Konsep Kinerja PNS

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Moeheriono, 2012). Kinerja PNS merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kinerja PNS diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 yang meliputi aspek sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja (KemenPAN-RB, 2019).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Wibowo (2019) meneliti tentang pengaruh implementasi kebijakan reformasi birokrasi terhadap kinerja PNS di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS.
2. Rahmawati (2018) mengkaji efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang. Temuan penelitian membuktikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan cukup efektif, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan resistensi PNS terhadap perubahan.
3. Kusuma (2017) mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil studi menyimpulkan bahwa implementasi reformasi birokrasi belum optimal karena lemahnya komitmen pimpinan, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya keterlibatan pegawai dalam perumusan kebijakan.

4. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengukur persepsi responden terhadap implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan kinerja PNS. Metode survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan salah satu perangkat daerah yang strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di bidang transportasi. Adapun waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni hingga Agustus 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS di lingkup Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare yang berjumlah 120 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak sederhana dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 92 orang.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel independen (X) yaitu implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang meliputi dimensi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
2. Variabel dependen (Y) yaitu kinerja PNS yang diukur dari sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Masing-masing variabel penelitian akan dijabarkan ke dalam indikator dan diturunkan menjadi item-item pernyataan dalam kuesioner dengan skala Likert 5 poin.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Kuesioner, disebarkan kepada 92 responden yang menjadi sampel penelitian untuk memperoleh data primer terkait variabel yang diteliti.
2. Wawancara mendalam (in-depth interview), dilakukan kepada beberapa informan kunci seperti pimpinan dan pegawai untuk menggali informasi lebih mendalam terkait implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan kinerja PNS.
3. Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan perilaku kerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.
4. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan data kepegawaian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan software SPSS. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi:

1. Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
2. Analisis regresi linear berganda, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Uji koefisien determinasi (R^2), untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
4. Uji F dan uji t, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan item-item pernyataan dalam kuesioner, sedangkan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran. Teknik yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson untuk uji validitas dan Cronbach's Alpha untuk uji reliabilitas. Instrumen dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel dan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,6.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare

Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Instansi ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang transportasi darat, laut, udara, serta sarana dan prasarana perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang dengan jumlah pegawai sebanyak 120 orang yang terdiri dari 87 PNS dan 33 tenaga kontrak.

Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare telah melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi seperti restrukturisasi organisasi, penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, dan peningkatan kompetensi ASN. Mekanisme implementasi dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pembentukan tim reformasi birokrasi, penyusunan rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Namun, pencapaian target reformasi birokrasi belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, dan resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai.

Analisis Kinerja PNS

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menilai kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare sudah cukup baik. Dalam aspek kedisiplinan, rata-rata kehadiran pegawai mencapai 95% dengan tingkat keterlambatan yang rendah. Produktivitas kerja PNS juga dinilai memuaskan dimana mayoritas pegawai mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang ditetapkan. Dalam hal kualitas pelayanan, sebagian besar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, namun masih terdapat beberapa keluhan terkait waktu tunggu dan prosedur yang kurang efisien. Adapun dari segi

pencapaian target kerja, rata-rata realisasi kinerja PNS adalah sebesar 92% dari target yang ditetapkan.

Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Kinerja

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reformasi birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS dengan koefisien regresi sebesar 0,68 dan nilai signifikansi 0,000. Artinya, semakin baik implementasi kebijakan reformasi birokrasi maka akan semakin tinggi pula kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare. Hal ini sejalan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,46 yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memberikan kontribusi sebesar 46% terhadap peningkatan kinerja PNS, sedangkan 54% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan reformasi birokrasi antara lain komitmen pimpinan, ketersediaan regulasi yang memadai, partisipasi aktif pegawai, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi yang belum efektif, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, budaya kerja yang belum adaptif terhadap perubahan, serta koordinasi antar unit kerja yang masih lemah.

Diskusi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini mendukung teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, faktor-faktor tersebut tercermin dari pentingnya sosialisasi kebijakan, ketersediaan sumber daya pendukung, komitmen pelaksana, serta penguatan kelembagaan. Hasil penelitian juga konsisten dengan studi terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh positif implementasi reformasi birokrasi terhadap kinerja pegawai.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu instansi saja. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan berbagai instansi dan stakeholders untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap kinerja ASN secara keseluruhan. Selain itu, perlu dikembangkan pula model implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan dan karakteristik birokrasi di Indonesia.

6. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare telah berjalan cukup baik, ditandai dengan pelaksanaan berbagai program seperti restrukturisasi organisasi, penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, dan peningkatan kompetensi ASN. Namun, pencapaian target reformasi birokrasi belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, dan resistensi terhadap perubahan.
2. Kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare secara umum sudah memuaskan, baik dari aspek kedisiplinan, produktivitas kerja, kualitas pelayanan, maupun pencapaian target kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan perbaikan seperti perlunya peningkatan efisiensi prosedur pelayanan dan optimalisasi pencapaian target kinerja.
3. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS dengan kontribusi sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan reformasi birokrasi maka akan semakin tinggi pula kinerja PNS di Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare.
4. Keberhasilan implementasi kebijakan reformasi birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komitmen pimpinan, ketersediaan regulasi, partisipasi pegawai, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain komunikasi yang belum efektif, keterbatasan SDM yang kompeten, budaya kerja yang belum adaptif, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare perlu mengoptimalkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan memperkuat komitmen seluruh stakeholders, meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi, serta memastikan ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai.

2. Peningkatan kinerja PNS dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur kerja, penguatan sistem rewards and punishment, pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, serta penerapan manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel.
3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan yang meliputi aspek struktur organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kerja agar dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal.
4. Diperlukan komitmen dan dukungan politik dari seluruh stakeholders, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi dan stakeholders untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mangkunegara, A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2014). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Widodo, J. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.